



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



**LAMPIRAN :   NOTA   KESEPAKATAN   ANTARA   PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**NOMOR       : 903/8536/TAHUN 2017**

**TANGGAL     : 28 NOVEMBER 2017**

**NOMOR       : 903/1029/TAHUN 2017**

**TANGGAL     : 28 NOVEMBER 2017**

**TENTANG**

## **KEBIJAKAN UMUM**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

---

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**NOMOR : 903/8536/TAHUN 2017  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017  
NOMOR : 903/1029/TAHUN 2017  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Ir. H. Aswin Effendi Siregar, MM  
Jabatan : Wakil Bupati Tapanuli Selatan  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Sipirok

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Nama : H. Rahmat Nasution, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Sipirok
3. Nama : Husin Sogot Simatupang  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Sipirok

4. Nama : H. Naswardi Sihalohe, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Sipirok

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **Pasal 1**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **Pasal 2**

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, asumsi terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **Pasal 3**

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

### **Pasal 4**

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan perubahan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini. Perubahan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 5**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

**Sipirok,**

**WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN**

**selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**Ir. H. ASWIN EFFENDI SIREGAR, MM**

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**selaku,  
PIHAK KEDUA**

**H. RAHMAT NASUTION, S.Sos**

**HUSIN SOGOT SIMATUPANG  
WAKIL KETUA**

**H. NASWARDI SIHALOHO, SH  
WAKIL KETUA**



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.

Dengan demikian dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta kondusif, berkeadilan, berkelanjutan dan berkesinambungan, pemerintah daerah harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat pokok-pokok kebijakan umum, target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

Untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut diatas dengan ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2013 untuk disampaikan



kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan guna dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam nota kesepakatan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

## 1.2 Gambaran Umum Capaian Kinerja, Target dan Proyeksi Tahun Rencana serta Permasalahan

### 1.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2016, Target Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018.

Capaian kinerja, target dan proyeksi tahun rencana dari Indikator Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dinilai dari berbagai bidang pembangunan dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Tahun 2016, Target Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
I.	Komintmen mewujudkan Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan derajat kesehatan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta pengamalan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ).				
A.	Pendidikan				Dinas Pendidikan
	Angka Melek Huruf (%)	99,93	99,94	99,96	
	Angka Harapan Lama Sekolah	13,07	14,16	14,51	
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,35	8,98	9,20	
	Angka Partisipasi Kasar :				
	APK PAUD (%)	41,31	45,00*	45,50*	
	APK SD/MI (%)	109,39	108,42	107,36	
	APK SMP/MTs (%)	79,29	89,00	89,11	
	APK SMA/MA/SMK (%)	53,66			
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SD/MI (%)	23,17	27,90	29,99	
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMP/MTs (%)	16,95	19,08	20,25	
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMA/MA/SMK (%)	18,97			
	Angka Partisipasi Murni :				
	APM SD/MI (%)	93,53	97,36	97,68	
	APM SMP/MTs (%)	67,17	83,87	86,43	
	APM SMA/MA/SMK (%)	45,95			
A.1	Pendidikan Dasar :				
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI	1:135	1:135	1:135	
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	1:278	1:221	1:210	
	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI	1:15	1:15	1:15	

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs	1:10	1: 10	1:10	
<b>A.2</b>	<b>Pendidikan Menengah :</b>				
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA	1:235			
	Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK/MA	1:11			
<b>A.3</b>	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>				
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Baik (%)	81,90	84,98	87,83	
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik (%)	66,35	74,08	79,75	
	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Baik (%)	96,11			
<b>A.4</b>	<b>Pendidikan Usia Dini :</b>				
	Persentase Cakupan PAUD (%)	41,31	45,00*	45,50*	
<b>A.5</b>	<b>Angka Putus Sekolah :</b>				
	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,36	0,35*	0,34	
	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,75	0,54	0,52	
	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	1,60			
<b>A.6</b>	<b>Angka Kelulusan:</b>				
	Persentase Angka Kelulusan SD (%)	98,93	99,80	99,92	
	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,41	100,00	100,00	
	Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	98,58			
	Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	84,23	95,36	96,15	
	Persentase Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	85,96			
	Guru Yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV (%)	77,50	79,08	80,54	
<b>B.</b>	<b>Kesehatan dan Keluarga Sejahtera</b>				Dinas Kesehatan
	Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 1.000 Kelahiran)	994,00	992,07	993,46	
	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	64,01	64,32	64,57	
	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,27	0,15	0,12	
	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	5,47	5,25	2,03	
	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 (KH)	17,65	0,72	0,67	
	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (Per 1.000 Balita)	1:73	1 : 69	1 : 65	
	Rasio Puskesmas, Pustu dan Pusling Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	0,32	0,32	0,32	
	Rasio Rumah Sakit per Satuan penduduk (Per 1000 Penduduk)	0,004	0,004	0,007	
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)	0,17	0,20	0,24	
	Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	1,48	1,55	1,79	



# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	81,00	83,98	86,25	
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	87,09	87,66	88,43	
	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (%)	85,00	85,47	87,72	
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (org)	967	900	900	
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (org)	12.987	18.000	18.000	
	Cakupan Kunjungan Bayi Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan (%)	85,00	75,49	79,73	
	Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Kecamatan (%)	114,29	114,29	106,67	
	Cakupan Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Desa (%)	22,18	22,18	22,18	
<b>C.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				Dinas Pengendalian Penduduk & KB
	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)	2,09	2,08	2,06	
	Rasio Akseptor KB (%)	66,09	67,46	68,85	
	Persentase Peserta KB Aktif (%)	21,50	21,70	22,30	
<b>D.</b>	<b>Kebudayaan</b>				Dinas Pendidikan
	1. Jumlah Group Kesenian	14,00	15,00	17,00	
	2. Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1,00	1,00	2,00	
	3. Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat (%)	50,00	55,00	60,00	
<b>E.</b>	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>				Dinas Pariwisata
	1. Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi)	40,00	40,00	41,00	
	2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)	5,00	12,00	14,00	
	3. Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)	6,00	13,00	15,00	
	4. Jumlah Gedung Olah Raga (Unit)	4,00	5,00	5,00	
	5. Jumlah Klub Olahraga (Klub)	21,00	22,00	24,00	
<b>II.</b>	<b>Komitmen Mewujudkan Misi 2 : Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;</b>				
<b>A.</b>	<b>Pertanian</b>				Dinas Pertanian
	1. Jumlah Kelompok Tani Program (Kelompok)	1.309,00	1.351,00	1.383,00	
	2. Jumlah Kelompok Tani Pemula (Kelompok)	916,00	1.210,00	1.239,00	
	3. Jumlah Kelompok Tani Lanjut (Kelompok)	124,00	133,00	134,00	
	4. Jumlah Kelompok Tani Madya (Kelompok)	4,00	6,00	7,00	



# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	5. Jumlah Kelompok Tani Utama (Kelompok)	1,00	2,00	3,00	
	6. Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha)	51,13	51,84*	52,74*	
	7. Produktivitas Padi Gogo (Kw/Ha)	32,52	32,61*	32,72*	
	8. Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	45,64	45,84*	45,97*	
	9. Produktivitas Kedelai (Kw/Ha)	15,10	15,10*	15,20*	
	10. Produksi Ubi Kayu (Kw/Ha)	343,27	346,80	361,20	
	11. Produktivitas Karet (Kg/Ha)	799,77	800,65	801,53	
	12. Produktivitas Perkebunan Sawit (Kg/Ha)	19.275,46	19.571,87	19.868,28	
	13. Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	781,50	785,15*	786,81*	
	14. Produktivitas kakao (Kg/Ha)	877,34	881,92	886,50	
	15. Produktivitas Aren (Kg/Ha)	1.344,00	1.411,63	1.411,63	
	16. Sarana Pemasaran Peternakan (Unit)	1,00	1,00	1,00	
	17. Populasi Ternak Sapi (ekor)	2.700,00	2.850,00	3.000,00	
	18. Populasi Ternak Kambing (ekor)	9.900,00	11.000,00	11.150,00	
	19. Populasi Ternak Ayam Kampung (ekor)	181.300,00	182.500,00	184.000,00	
	20. Populasi Ternak Itik (ekor)	36.000,00	37.200,00	38.500,00	
	21. Angka Prevalensi Penyakit Hewan	2,05	2,04	2,03	
	22. Nilai Tukar Petani	101,85	102,13	102,41	
<b>B.</b>	<b>Pangan</b>				Dinas Ketahanan Pangan
	1. Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr)	1,278,00	2.000,00	2.000,00	
	2. Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	43,34	52,00	52,00	
	3. Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan	0,00	1,00	1,00	
	4. Persentase Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)	0,20	1,30	1,50	
	5. Skor Pola Pangan Harapan (%)	72,10	88,40	90,54	
	6. Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)	0,63	1,00	1,00	
	7. Stabilitasnya Harga Beras di Tingkat Konsumen (CV)	0,50	<10,00	<10,00	
	8. Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (%)	75,00	81,00	82,00	
	9. Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)	10,00	55,00	65,00	
<b>C.</b>	<b>Industri</b>				Dinas Perindustrian
	1. Kontribusi Industri Terhadap PDRB (%)	6,63	5,93	5,37	
	2. Pertumbuhan Industri (%)	1,75	2,43	2,43	
	3. Jumlah Kelompok Pengrajin (Kelompok)	37,00	42,00	45,00	
	4. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	23,00	24,21	26,39	
	5. Jumlah Industri Kecil (IK)	60,00	60,00	62,00	
	6. Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)	1.080,00	1.077,00	1.083,00	
<b>D.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				Dinas Perindustrian
	1. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)	80,60	82,55	85,75	
	2. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)		18,63	23,49	

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	3. Pertambangan Tanpa Ijin Yang Ditetapkan (%)	9,07	27,94	32,49	
	4. Regulasi Untuk Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	0,00	1,00	1,00	
	5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)	85,52	84,63	87,35	
<b>E.</b>	<b>Perdagangan</b>				Dinas Perdagangan Kop. Dan UKM
	1. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB (%)	10,49	10,42	9,93	
	2. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Rp.juta)	544.999,87	740.443,32	798.128,95	
	3. Cakupan Kelompok Bina Usaha Pedagang Informal (%)	87,86	88,39	88,93	
	4. Persentase Alat Ukur UTP yang ditera/tera ulang (%)	0,00	45,45	66,18	Dinas Perdagangan Kop. Dan UKM
<b>F.</b>	<b>Koperasi dan UKM</b>				
	1. Jumlah Koperasi (Buah)	284,00	296,00*	306,00*	
	2. Persentase Koperasi Aktif (%)	53,16	55,07*	56,54*	
	3. Jumlah UKM/K (Buah)	2.113,00	2.135,00	2.155,00	Dinas Penanaman Modan dan Perizinan
	4. Jumlah BPR/LKM	8,00	8,00	9,00	
<b>G.</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
	1. Jumlah PMA/PMDN (Buah)	11,00	12,00	13,00	
	2. Jumlah Tenaga Kerja Pada PMA/PMDN (Buah)	6.305	7.571	7.672	Dinas Ketenagakerjaan
	3. Rata-rata Lama Proses Perizinan (Hari)	3,00	8,10	8,10	
	4. Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)	1.640,26	4.600,00	1.376,34	
	5. Persentase Tenaga Kerja Lokal pada PMA/PMDN (%)	60,00	61,00	62,00	
<b>H.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				Dinas Ketenagakerjaan
	1. Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	127.218	129.355	130.429	
	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,87	77,55	77,88	
	3. Persentase Sengketa Pengusaha – Pekerja (%)	5,26	4,94	4,17	
	4. Persentase Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,37	5,09	Dinas Perikanan
	5. Rasio Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	76,49	100,00	100,00	
<b>I.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
	1. Produksi Budidaya Perikanan Darat (Ton)	6.990,00	7.016,00*	7.042,10	
	2. Produksi Perikanan Laut (Ton)	172,00	173,08*	177,13	Dinas Perikanan
	3. Kosumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)	33,80	33,80	35,03	
	4. Persentase Capaian Konsumsi Ikan (%)	95,50	96,00*	96,38	
	5. Cakupan Kelompok Budidaya Perikanan Darat (%).	58,96	60,74	65,60	
	6. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	66,67	69,28	73,09	Dinas Pariwisata
<b>J.</b>	<b>Pariwisata</b>				
	1. Kunjungan Wisata (Wisatawan)	36.852,00	38.628,00	40.404,00	Dinas Pariwisata
	2. Jumlah Objek Wisata Yang Dikembangkan (Jumlah)		1,00	2,00	

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
III.	<b>Komitmen Mewujudkan Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan pening katan pemanfaatan sumber daya daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk Pelayanan umum masyarakat.</b>				
A.	<b>Infrastruktur</b>				
A.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	46,14	47,39	48,27	
	2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	63,71	64,52	65,46	
	3. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	3,00	3,00	3,00	
	4. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	1,94	1,94	1,94	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
	5. Rasio Daya Tampung TPS Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	0,81	0,81	1,59	Dinas Lingkungan Hidup
	6. Rasio Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4	0,004	0,004	0,004	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) (%)	93,87	94,96	95,57	
	8. Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase (%)	0,24	0,26	0,29	
	9. Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	59,07	66,10	69,91	
	10. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	50,00	56,60	60,00	
	11. Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan (%)	3,79	4,07	4,34	
A.2	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
	1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	64,67	65,95	67,26	
	2. Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	80,60	82,55	85,75	
	3. Rumah Tangga Bersanitasi (%)	35,00	37,25	39,14	
	4. Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0,07	0,07	0,07	
	5. Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah (%)	67,68	78,58	79,17	
	6. Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata (%)	35,00	35,80	36,27	
B	<b>Perhubungan</b>				Dinas Perhubungan
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	2.564.890	2.564.790	2.628.910	
	Rasio Ijin Trayek (%)	0,047	0,051	0,052	
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Buah)	3.157	3.268	3.268	
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	0,00	0,00	1,00	
	Jumlah Angkutan Darat Terhadap Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)	0,05	0,07	0,08	

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	Rasio Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	26,05	26,65	26,78	
	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	35,00	35,00	35,00	
	Persentase Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (%)	73,97	77,63	80,99	
	Pemasangan Rambu-rambu				
	Marka Jalan (Km)		12,00	15,00	
	Pagar Pengaman Jalan (km)		35,00	39,00	
	Deliniator (Unit)		28,00	43,00	
	Trafic Light (unit)		1,00	4,00	
	Rambu Petunjuk (buah)		9,00	12,00	
	Halte (Unit)		16,00	19,00	
	Cermin Tikungan (buah)		1,00	2,00	
<b>C.</b>	<b>Pertanahan</b>				Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	66,67	100,00	100,00	
<b>D.</b>	<b>Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana</b>				
	1. Persentase Pencemaran Status Mutu Air (%)	92,85	92,85*	92,85*	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Persentase Sampah Tertangani (%)	22,45	19,35	23,60*	
	3. Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100,00	100,00	100,00	
	4. Cakupan Pelayanan Kebakaran		0,001	0,003	Satpol PP
	5. Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan (%)	42,86	62,50	87,50	BPBD
	6. Cakupan Masyarakat Terdampak Bencana Yang Mendapat Pelayanan Tanggap Darurat (%)	100,00	100,00	100,00	
	7. Cakupan Dokumen Penanggulangan Bencana (%)	13,33	40,00	53,33	
	8. Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	12,50	30,77	53,85	
<b>D.</b>	<b>Kehutanan</b>				Dinas Lingkungan Hidup
	1. Rehabilitasi Hutan & Lahan Kritis (%)	1,55	1,89*	2,56*	
	2. Kerusakan Kawasan Hutan (%)	17,56	22,96	17,22*	
<b>IV.</b>	<b>Komitmen Mewujudkan Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerin tahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.</b>				
<b>A.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				Dinas Kominfo
	1. Jumlah Jaringan Komunikasi	4,00	4,00	5,00	
	2. Jumlah Surat Kabar Nasional (Jenis)	5,00	5,00	5,00	
	3. Jumlah Penyiaran Radio /TV	14,00	14,00	15,00	
	4. Website Milik Pemda (Unit)	1,00	1,00	2,00	
	5. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	65,72	66,56	67,41	
	6. Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)	63,19	66,67	75,00	
<b>B.</b>	<b>Statistik</b>				Dinas Kominfo
	1. Penyajian Kabupaten Dalam Angka (Dokumen)	3,00	3,00	3,00	
	2. Penyajian PDRB Kabupaten (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
<b>C.</b>	<b>Unsur Staf</b>				
	1 Rasio Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Yang Terealisasi (%)	90,40	93,71	94,03	Setdakab
	2 Jumlah Dokumen Pelaporan Data Perekonomian Serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	0,00	2,00	2,00	
	3 Persentase Jabatan Struktural Yang Dilaksanakan Dibanding Dengan Jabatan Menurut PP 18 Tahun 2016 (%)	0,03	95,00	95,00	
	4 Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD (%)	0,00	100,00	0,00	
	5 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	70,00	63,33	65,00	
	6 Persentase Perda Yang Dilakukan Konsultasi Publik (%)	90,00	37,50	40,00	
	7 Cakupan Pelayanan Administrasi Sosial Kemasyarakatan (%)	71,43	63,33	65,00	
	8 Persentase Naskah Dinas Yang Tertangani (%)	39,55	80,00	80,00	Setdakab
	9 Persentase BUMD yang Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) %	0,00	0,00	50,00	Setdakab, BUMD
	10 Kontribusi BUMD Terhadap PAD (%)	0,39	0,50	0,47	
	<b>Unsur Pelayanan DPRD</b>				Sekretariat Dewan
	1 Jumlah Anggota DPRD (Orang)	30,00	30,00	30,00	
	2 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan untuk dibahas dan ditindak lanjuti DPRD (Buah)	13,00	20,00	20,00	
	3 Jumlah Produk Peraturan Daerah yang menggunakan hak inisiatif (Buah)	2,00	9,00	10,00	
<b>D.</b>	<b>Unsur Pengawas</b>				Inspektorat
	1 Persentase Sistem dan Prosedur Pengawasan yang terpenuhi dibandingkan dengan keharusan dan ketentuan (%)	0,00	81,00	82,00	
	2 Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan (%)	82,00	81,00	82,00	
	3 Terselenggaranya penanganan tindak lanjut hasil pengawasan (%)	81,00	81,00	82,00	
	4 Persentase Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (%)	31,00	57,00	71,00	
	5 Rasio Temuan BPK RI Yang Ditindaklanjuti (%)	80,00	81,00	82,00	
	6 Terselenggaranya pemeriksaan khusus dan sertijab, pengaduan masyarakat serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	34,98	81,00	82,00	
<b>E.</b>	<b>Unsur Penunjang Perencanaan</b>				Bappeda
	1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJD Yang Ditetapkan Dengan PERDA (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	2 Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	
	3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD Yang Ditetapkan Dengan Perkada	1,00	1,00	1,00	
	4 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Hasil Analisis (Dokumen)		1,00	1,00	
	5 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	85,81	91,57	92,43	
	6 Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	
	7 Tersusunnya Regulasi Tata Cara Penyusunan (Dokumen) Rencana Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	
	8 Tersedianya RTRW (Dokumen)	0,00	1,00	1,00	
	9 Tersedianya E Planning Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	50,00	100,00	100,00	
	10 Tersedianya Dokumen RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	
	11 Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	
	12 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Pokja)	1,00	1,00	1,00	
	13 Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-2021 Serta Target Kinerja 2016-2021 (Dokumen)	0,00	1,00	1,00	
<b>F.</b>	<b>Unsur Penunjang Keuangan</b>				Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
	1 Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)	75,15	91,76	94,68	
	2 Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)	43,88	43,92	44,25*	
	3 Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)	6,34	6,00	6,10	
	4 Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)	4,53	0,25	0,25	
	5 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)	95,27	93,71	94,03	
	6 Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi PAD (%)	108,36	94,80	95,60	
	7 Peningkatan PAD (%)	-29,91	-20,62	5,39	
	8 Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)	98,68	96,33	96,67	
	9 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	
	10 Keberadaan PERDA Tentang Pengelelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	11 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)	100,00	100,00	100,00	
<b>G.</b>	<b>Unsur Penunjang Kepegawaian Serta Diklat</b>				Badan Kepegawaian
	1 Rasio PNS Terhadap Penduduk (%)	1,77	1,98	1,95	
	2 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	160,00	320,00	300,00	
	3 Persentase Aparatur PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (%)	4,71	6,29	5,99	
	4 Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan eslon (%)	16,85	17,50	21,20	
<b>H.</b>	<b>Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>				Bappeda
	1 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders (%)		50,00	56,25	
	2 Kajian Penelitian Indeks Pembangunan Daerah (Dokumen)		1,00	1,00	
<b>I.</b>	<b>Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik &amp; Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan</b>				Kecamatan/ Dinas PMD
	1 Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)	212,00	212,00	212,00	
	2 Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)	212,00	212,00	212,00	
	3 Jumlah Dokumen RKPdes (Dokumen)	212,00	212,00	212,00	
<b>J.</b>	<b>Perpustakaan</b>				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1. Jumlah Perpustakaan (Unit)	118,00	126,00	134,00	
	2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun (Orang)	57.441,00	59.436,00	62.529,00	
	3. Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)	89,00	95,00	100,00	
<b>K.</b>	<b>Kearsipan</b>				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1. Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	95,00	100,00	100,00	
<b>L.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>				Dinas PMD
	1. Persentase Aparatur Pemerintah Desa Yang Berkompeten (%)	25,38	42,12	46,59	
	2. Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)	212,00	212,00	212,00	
	3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0,06	0,07	0,07	
	4. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,06	0,05	0,05	
	5. Jumlah LSM Yang Aktif	30,00	31,00	32,00	Kesbang Pol
	6. Jumlah Pos Yandu Aktif	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD
	7. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa (%)	26,63	27,38	28,89	
<b>M.</b>	<b>Hukum</b>				
	1. Angka Kriminalitas	6,00	9,71	9,35	Kesbang /



# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



No	Misi / Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	2. Penegakan Perda (%)	52,00	71,50	77,20	Satpol PP
<b>N.</b>	<b>Kependudukan</b>				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1. Rasio Pasangan Ber Akte Nikah (%)	23,89	30,83	35,96	
	2. Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran (%)	68,92	71,32	76,04	
	3. Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk (%)	84,37	89,95	91,13	
	4. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	84,06	88,00	91,00	
<b>V.</b>	<b>Komitmen Mewujudkan Misi 5 : Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat</b>				
<b>A.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1. Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah (%)	59,08	55,47	54,41	
	2. Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)	26,94	28,00	29,06	
	3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,02	0,02	0,02	
	4. Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>				Dinas Sosial
	1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	91,83	92,97	93,29	
	2. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan (Unit)	4,00	4,00	4,00	
	3. Sarana Sosial Seperti Panti Jompo (Unit)	4,00	4,00	4,00	
	4. Persentase Penanganan PMKS (%)	3,37	52,00	54,00	
<b>C.</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				Satpol PP/ Kesbang
	1. Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	4,22	4,22	4,22	
	2. Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	109,05	107,39	106,53	
	3. Jumlah Pos Kamling	129,00	169,00	188,00	
	4. Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa/kelurahan	52,02	68,15	75,81	
	5. Penegakan Perda (%)	52,00	71,50	77,20	
	6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	46,03	47,12	48,22	
	7. Cakupan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100,00	100,00	100,00	
	8. Cakupan Pembinaan Politik Daerah (%)	70,00	71,00	73,00	

## 1.2.2 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah adalah gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai 5 tahun mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun pokok-pokok permasalahan daerah yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pembangunan daerah adalah :



## 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Permasalahan yang dihadapi dalam Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi pada tahun 2016 adalah :

- Rendahnya PDRB Perkapita ADHB Tapanuli Selatan sebesar Rp. 39,60 Juta dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHB Sumatera Utara sebesar Rp. 44,56 Juta
- Tingginya persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 11,15 persen dibandingkan dengan penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,35 persen.

### b. Fokus Kesejahteraan Sosial

- IPM Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 68,04 masih dibawah IPM Provinsi Sumatera Utara sebesar 70,00. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 8,35 Tahun pada tahun 2016 masih rendah dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,12 Tahun, Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 64,01 Tahun lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,33 Tahun, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 13,07 tahun lebih tinggi dari Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara sebesar 13,00 tahun dan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp. 10.821.000,- lebih tinggi dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 9.744.000,-.
- Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 109,39 persen, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 79,29 persen, Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tingkat SD/MI sebesar 23,17 persen, Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tingkat SLTP sebesar 16,95 persen, Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI sebesar 93,53 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP sebesar 67,17 persen.
- Masih rendahnya kualitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti :



Angka Harapan Hidup Tahun 2016 hanya sebesar 64,01 Tahun, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 (KH) sebesar 17,65, Persentase balita gizi buruk sebesar 0,27 persen.

- Data yang akurat mengenai lahan bersertifikat belum didapatkan secara optimal disebabkan instansi yang menerbitkan sertifikat yaitu Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi vertikal, oleh karena diperlukan upaya koordinasi yang lebih optimal.

### c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

- Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Tapanuli Selatan serta jumlah gedung kesenian maupun group kesenian tidak menunjukkan peningkatan.
- Perkembangan keolahragaan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai indikator jumlah gedung olahraga maupun klub olahraga belum menunjukkan peningkatan .

## 2. Aspek Pelayanan Umum

### a. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar

- Bidang Pendidikan; Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 41,31 persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan capaian APK PAUD Provinsi Sumatera Utara sebesar 73,18 persen, Jumlah SD/MI dalam kondisi baik sebesar 82,13 persen perlu ditingkatkan agar mencapai 100 persen, Jumlah SLTP dalam kondisi baik sebesar 68,41 persen perlu ditingkatkan agar mencapai 100 persen, Masih terdapat Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,36 persen, Masih terdapat Angka Putus Sekolah SLTP sebesar 0,75 persen, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SLTP baru mencapai 84,23 persen, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru mencapai 77,50 persen.
- Bidang Kesehatan; Belum ada peningkatan atas Rasio Posyandu Persatuan Balita yaitu 1 : 73 masih belum memenuhi kondisi ideal yaitu 1 : 52, Rasio tempat tidur di rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 1 : 2.292 masih sangat kurang dibandingkan dengan standar WHO yaitu 1 : 1000 penduduk, Rasio dokter terhadap jumlah penduduk yaitu 1 : 5.882 masih sangat kurang bila dibandingkan dengan rasio ideal yaitu 1 : 2.500 penduduk, Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 81,00 persen belum memenuhi SPM



Nasional tahun sebesar 90 persen, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 87,09 persen belum memenuhi SPM Nasional yaitu 100 persen, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Tapanuli Selatan baru mencapai 85,00 persen belum memenuhi target SPM Nasional yaitu 100 persen, Cakupan Kunjungan Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan baru mencapai 85,00 persen masih dibawah target SPM Nasional sebesar 90 persen, Cakupan pustu terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 1 : 4,5 sementara rasio ideal adalah 1 : 2 berarti Tapanuli Selatan masih kurang 69 pustu lagi.

- Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan dan Jembatan ; Relatif masih tingginya panjang jalan kabupaten yang rusak/rusak berat (sebesar 36,29 persen), sampai dengan tahun 2016 persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap baru sebesar 63,71 persen, Masih terdapat jalan nasional yang berfungsi sangat vital yang belum memenuhi syarat sesuai kebutuhan utamanya dari lebar jalan, Sebagian besar jalan propinsi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan belum dalam kondisi mantap.

Sumber Daya Air dan Irigasi ; persentase luas Daerah Irigasi kabupaten tahun 2016 dalam kondisi baik baru sebesar 59,07 persen, dimana belum meratanya panjang irigasi dengan luas daerah irigasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, masih rendahnya efisisensi dan efektifitas pengelolaan jaringan irigasi dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada baru mencapai 50,00 persen.

Rasio Bangunan Ber IMB ; Masih rendahnya kemauan, kemampuan dan kesadaran masyarakat untk mengurus IMB, Sebelum adanya regulasi tentang Izin Mendirikan Bangunan, telah banyak bangunan yang berdiri, Masih lemahnya upaya penegakan perda terhadap rumah-rumah yang belum atau tidak memiliki IMB, Luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dimana keberadaan rumah-rumah yang ada juga menyebar sehingga menyulitkan dalam melaksanakan pemantauan.



### - Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah penduduk yang mempunyai akses air minum baru mencapai 64,67 persen, dimana masyarakat masih enggan memelihara dan mengelola Sarana dan Prasarana Air Minum yang ada secara swadaya, Luasnya sebaran penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga membutuhkan Sarana Air Minum yang cukup banyak. Lingkungan permukiman kumuh telah mencapai 0,07 persen, sedangkan jumlah rumah tangga bersanitasi masih cukup rendah yaitu baru mencapai 35,00 persen, hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya sanitasi bagi kesehatan, rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun sanitasi rumah tangga disebabkan luas lahan untuk rumah penduduk yang terbatas untuk membangun septik tank. Dari kondisi capaian tahun 2016 terhadap akses air minum, lingkungan kumuh dan sanitasi masyarakat masih jauh dari target Universal Access 100-0-100.

Rasio Rumah Layak Huni ; Masih banyaknya penduduk miskin sehingga kemampuan untuk membangun rumah yang layak belum memadai, Masih banyaknya rumah masyarakat yang berstatus sewa dimana pemilik rumah kurang peduli dengan kondisi rumah yang disewakannya, Terkendalanya pemberian bantuan rumah swadaya karena banyaknya rumah yang berstatus sewa (bukan milik sendiri), atau lahan yang ditempati banyak yang berstatus sewa/pinjam. Kondisi sampai akhir tahun 2016 persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah sebesar 67,68 persen.

- Bidang Sosial ; Cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial belum optimal terkait dengan penanganan PMKS yang masih rendah sebesar 3,37 persen pada tahun 2016, namun disisi lain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial telah mencapai 91,83 persen.

### b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

- Bidang Tenaga Kerja ; Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 76,87 persen, Peningkatan jumlah





angkatan kerja belum seimbang dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,91 persen menunjukkan kecenderungan penurunan dibanding Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara pada angka 6,71 persen.

- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; Perlindungan terhadap perempuan dan anak masih lemah, terlihat dengan masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, kejadian yang paling banyak adalah kejahatan seksual dan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT), Belum Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, Belum efektifnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Kelembagaan PUG).
- Bidang Pangan ; Belum adanya regulasi kedaulatan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan, persentase penanganan desa rawan pangan masih relatif rendah sebesar 10,00 persen, sampai dengan Tahun 2016 penurunan konsumsi beras per kapita baru mencapai 0,63 persen. Selain itu belum optimalnya produktivitas pertanian pangan.
- Bidang Lingkungan Hidup ; Belum jelasnya pembagian tugas dalam penanganan sampah secara menyeluruh, Kurangnya sarana dan prasarana penanganan persampahan, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, Meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir mengakibatkan pencemaran aliran sungai. Minimnya penanganan sampah, hanya terdapat 1 TPS tidak sesuai dengan perkembangan penduduk, karenanya sampah yang tidak tertangani oleh penduduk dibuang ke sungai, ditanam ataupun dibakar. Sulitnya memperoleh pembebasan lahan untuk pembangunan TPS yang memadai. Sulitnya mendapatkan lahan yang strategis untuk pembangunan TPS yang memenuhi syarat, Banyaknya keberatan dari masyarakat dalam setiap usaha pembangunan TPS.
- Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ; Kependudukan di Tapanuli Selatan tidak tersebar merata. Ada wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi seperti Batang Angkola dan Batang Toru dan juga ada wilayah dengan kepadatan yang rendah seperti Aek Bilah dan Arse disebabkan perekonomian, Capaian penduduk ber KTP Kabupaten Tapanuli



Selatan sebesar 84,37 persen. Capaian penduduk ber Akte Kelahiran sebesar 68,92 persen.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; Masih rendahnya aparaturnya Pemerintah Desa yang memiliki kompetensi, pada tahun 2016 capaian baru sebesar 25,38 persen. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa, lemahnya kapasitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan. LSM Aktif baru mencapai 30,00 LSM. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB yang ditandai masih rendahnya rasio akseptor KB sebesar 66,09 persen. Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB.
- Bidang Perhubungan ; Belum ada terminal bus yang refresentatif untuk melayani penumpang dari dan keluar kabupaten. Keterbatasan sarana dan prasana perhubungan khususnya pada wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan.
- Bidang Komunikasi dan Informatika ; Terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika di berbagai wilayah dalam menunjang akses masyarakat untuk memperoleh informasi melalui teknologi informasi.
- Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; Koperasi Aktif baru menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 53,16 persen. Jumlah UKM/K baru mencapai 2.113,00 UKM.
- Bidang Penanaman Modal ; Jumlah PMDN/PMA sebanyak 11,00 PMDN/PMA. Daya serap tenaga kerja lokal pada PMDN/PMA baru sebesar 60,00 persen, masih perlu lebih ditingkatkan. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah, baik penyediaan media promosi, kerjasama promosi maupun strategi pemasaran investasi. Masih rendahnya minat investor menanamkan modalnya
- Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ; Rendahnya kinerja organisasi kepemudaan dan olah raga ditandai dengan organisasi olah raga, klub-klub olahraga maupun kegiatan kepemudaan dan olahraga tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.





- Bidang Persandian ; Belum adanya regulasi maupun petunjuk yang jelas tentang masalah persandian di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Bidang Kebudayaan ; Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan seni dan budaya. Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai budaya daerah terutama budaya lokal ditandai dengan minimnya jumlah penyelenggaraan event-event seni dan budaya.
- Bidang Perpustakaan ; Belum meratanya layanan perpustakaan menjangkau seluruh wilayah.
- Bidang Kearsipan ; Belum terpenuhinya pengelolaan arsip secara baku 100 persen. Masih kurangnya kualitas SDM pengelola kearsipan.

### c. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- Bidang Pemerintahan Umum

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya evaluasi organisasi perangkat daerah yang ada terhadap kebutuhan dan tuntutan beban kerja.
- Belum optimalnya penggunaan teknologi pelayanan informasi di OPD dan Pemerintah untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Belum optimalnya pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, disebabkan karena belum memiliki aparat pengawas/auditor yang sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Belum optimalnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, baik pajak maupun retribusi daerah.
- Kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel belum optimal, disebabkan karena terbatasnya kapasitas SDM dan peralatan kerja.
- Belum efektifnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah disebabkan rendahnya



pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai administrasi pertanahan.

- Belum optimalnya peran BUMD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PAD
  - Rendahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah
  - Belum optimalnya konsistensi dan komitmen kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam pelaksanaannya (perencanaan dan penganggaran)
  - Pada bidang politik permasalahan yang dihadapi cukup kompleks, masih dirasakan bahwa aspirasi-aspirasi masyarakat yang positif belum terakomodir secara optimal oleh lembaga politik, partai politik maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - Penegakan hukum kondisinya belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi aparaturnya pemerintah daerah untuk bersikap secara profesional dan lebih responsive akan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik.
  - Lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
  - Kurangnya sosialisasi peraturan pada masyarakat maupun aparaturnya pemerintah menimbulkan kesalah pahaman
  - Perbedaan persepsi/pemahaman terhadap otonomi daerah
  - Belum optimalnya komunikasi antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan segala aspek bidang pembangunan
  - Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan dengan sistem yang berbasis IT (Informasi Teknologi)
- Bidang Penanggulangan Bencana
- Belum optimalnya penanganan terhadap korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat penyebabnya antara lain jumlah prasarana sarana belum memadai.
  - Belum optimalnya bantuan sosial yang diberikan kepada korban selama tanggap darurat.

#### d. Urusan Pemerintahan Pilihan



- Bidang Kelautan dan Perikanan
  - Produksi perikanan di Tapanuli Selatan masih mengandalkan hasil budidaya perikanan darat, pada tahun 2016 capai produksi mencapai 6.990,00.
  - Budidaya perikanan maupun penangkapan ikan masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga kurang efektif dan efisien.
  - Angka konsumsi ikan di Tapanuli Selatan masih lebih rendah dari angka konsumsi Sumatera Utara dan Nasional.
- Bidang Pariwisata
  - Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih minim.
  - Pengelolaan objek-objek wisata belum dilakukan secara profesional.
- Bidang Pertanian
  - Produktivitas padi sawah Tapanuli Selatan sebesar 51,13 Kw/Ha masih lebih rendah dibanding produktivitas Provinsi Sumatera Utara yaitu 53,07 Kw/Ha.
  - Produktivitas kedelai Tapanuli Selatan yaitu 15,10 Kw/Ha berada di atas rata-rata produktivitas kedelai Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,80 Kw/Ha.
  - Produktivitas jagung sebesar 45,64 Kw/Ha masih dibawah rata-rata provinsi sebesar 61,63 Kw/Ha.
  - Produktivitas tanaman karet Tapanuli Selatan sebesar 799,77 Kg/Ha, sedangkan untuk produktivitas perkebunan sawit sebesar 19.275,46 Kg/Ha.
  - Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan daerah.
  - Belum adanya pengembangan kawasan pertanian yang terpadu dan terintegrasi.
  - Belum adanya kepastian serapan pasar produk pertanian dengan tingkat harga menguntungkan petani.
- Bidang Kehutanan
  - Hutan dan lahan kritis yang dapat direhabilitasi masih sangat minim, kondisi capaian kinerja terkait rehabilitasi hutan dan lahan kritis tahun 2016 sebesar 1,55 persen.



- Tingginya acaman kerusakan hutan akibat illegal logging dan kebakaran hutan
- Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - Masih minimnya penambangan liar yang berhasil ditertibkan.
  - Masih banyaknya desa yang belum mendapatkan akses energi listrik karena berada dilokasi yang sulit terjangkau
  - Sektor pertambangan masih didominasi oleh investor luar daerah/asing sehingga pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Bidang Perdagangan
  - Secara nominal kontribusi sektor perdagangan menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 s/d tahun 2016, akan tetapi secara persentase kontribusi sektor perdagangan memperlihatkan kecenderungan penurunan yang berarti perkembangan sektor perdagangan berada dibawah perkembangan sektor-sektor lainnya.
  - Pembinaan kelompok pedagang belum dapat terpenuhi secara optimal baru dapat mencapai 87,86 persen.
  - Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata
- Bidang Perindustrian
  - Pembinaan kelompok pengrajin belum dapat terpenuhi secara optimal baru dapat mencapai 23,00 persen.
  - Belum berkembangnya industri kecil menengah yang dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
  - Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri.
- Bidang Ketransmigrasian ; Sektor transmigrasi tidak mengalami perkembangan.

### 3. Aspek Daya Saing Daerah

- Kemampuan Ekonomi Daerah



- Adanya ketimpangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perbulan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar adalah untuk makanan 63,67 persen dan bukan makanan sebesar 36,33 persen, dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara perbandingan ini sudah mulai berimbang dimana untuk makanan sebesar 55,31 persen dan bukan makanan sebesar 44,69 persen.
- Adanya ketimpangan antara penduduk yang bekerja disektor pertanian dengan kontribusinya terhadap PDRB, dimana penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 68,39 persen sementara kontribusinya terhadap PDRB hanya 42,43 persen.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 ini dimaksudkan untuk dapat tercapainya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang butir-butir Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 adalah untuk dapat dijadikan pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

### 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Panjang Jangka Pembangunan Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali





- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 );
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Seri E );
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006 - 2025;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;





26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Urusan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

*Memuat tentang latar belakang, gambaran umum capaian kinerja pada tahun sebelumnya, target tahun berjalan dan proyeksi pencapaian tahun rencana, permasalahan, maksud dan tujuan, dasar hukum serta Sistematika Penulisan;*

**BAB II : GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

*Memuat tentang kebijakan umum daerah, prioritas pembangunan daerah;*

**BAB III : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PROYEKSI PENERIMAAN SERTA BELANJA DAERAH**

*Memuat tentang gambaran umum ekonomi makro daerah, perkiraan tentang penerimaan dan arah kebijakan keuangan daerah serta proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;*

**BAB IV : PENUTUP**



## BAB 2

### GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### 1.1 Kebijakan Umum Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dengan Visi Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu **“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”**

Misi Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencapaian Visi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.



Adapun tujuan pembangunan yang akan dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah :

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih dan berwibawa melalui reformasi yang berkesinambungan.
5. Terwujudnya kualitas standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan sasaran yang akan dihasilkan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah :

**Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), dengan sasaran :**

1. Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan ummat beragama.
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun.
3. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

**Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran :**

1. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka
3. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah
4. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Baru



**Tujuan 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat, dengan sasaran :**

1. Meningkatnya Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah
2. Meningkatnya Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat
3. Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh

**Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih dan berwibawa, dengan sasaran :**

1. Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa
4. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi

**Tujuan 5 : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran :**

1. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya.
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka pemerintah daerah menyusun strategi pembangunan dalam jangka waktu Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Strategi yang digunakan untuk melaksanakan Misi Pertama **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan umat beragama“, strategi yang akan digunakan adalah :



- 1) Meningkatkan kehidupan beragama dan kerukunan antar suku dan umat beragama
  - 2) Menumbuhkembangkan adat, budaya dan kearifan lokal dalam masyarakat
  - 3) Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun“, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
  - 2) Meningkatkan kreativitas dan prestasi generasi muda
- c. Untuk mencapai sasaran ketiga: “Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi“, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan kemampuan, keahlian, kompetensi dan daya saing masyarakat
- d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat“, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan terhadap ibu hamil dan nifas
  - 2) Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan tentang kesehatan anak balita
  - 3) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
  - 4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Strategi yang digunakan untuk melaksanakan Misi Kedua **Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang produktif dan berwawasan lingkungan** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat“, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Ekstensifikasi dan intensifikasi sektor-sektor perekonomian utama masyarakat



- 2) Meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat dalam pengembangan aneka industri
  - 3) Meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan kebutuhan strategis lainnya
  - 4) Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pemasaran produk sektor-sektor perekonomian daerah
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : " Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah", strategi yang digunakan adalah :
- 1) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
- c. Untuk mencapai sasaran ketiga : "Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka", strategi yang digunakan adalah :
- 1) Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan
  - 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja
- d. Untuk mencapai sasaran keempat : "Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Baru", strategi yang digunakan adalah :
- 1) Mendorong dan Memfasilitasi Tumbuhnya Usaha-Usaha Baru di Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk melaksanakan Misi Ketiga **Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : " Meningkatkan Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah", strategi yang digunakan adalah :
  - 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Atasan
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : "Meningkatnya Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat", strategi yang digunakan adalah :





- 1) Meningkatkan dan Mendorong Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat
- c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan”, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Mengupayakan Pembangunan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Dana APBD dan/atau dari Pemerintah Atasan
- d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh”, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum lainnya
  - 2) Meminimalisir adanya lingkungan permukiman kumuh
  - 3) Meningkatkan ketaatan terhadap penataan ruang daerah.
  - 4) Optimalisasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  - 5) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah

Strategi yang digunakan untuk melaksanakan Misi Keempat **Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal”, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah
  - 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan daerah
  - 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan umum
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa” strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa
  - 2) Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan desa





- c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa”, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
  - 2) Meminimalisir kesalahan kesalahan dalam penganggaran, pelaksanaan serta administrasi program kegiatan
  - 3) Meningkatkan kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya kehidupan berdemokrasi”, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
  - 2) Peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat
  - 3) Menumbuhkembangkan lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan

Strategi yang digunakan untuk melaksanakan Misi Kelima **Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat”, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih bagi masyarakat
  - 2) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat
  - 3) Meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
  - 4) Meningkatkan kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : ” Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya”, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Meningkatkan perlindungan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat
  - 2) Menurunkan angka Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”, strategi yang digunakan adalah :



- 1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan
- 2) Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat dan dunia usaha
- 3) Meningkatkan perlindungan anak.

Berlandaskan kepada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan maka :

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan **Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan umat beragama“, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
  - 1) Meningkatkan perlindungan dan pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama
  - 2) Re-Covery pemahaman dan implementasi nilai-nilai adat, budaya dan kearifan dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan
  - 3) Meminimalisir potensi-potensi yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik di masyarakat
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun“, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
  - 1) Memfasilitasi dan mendorong semua lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk senantiasa memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal agar meningkat penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi dan daya saing
  - 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
  - 3) Meningkatkan minat baca masyarakat
  - 4) Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kapasitas kegiatan kepemudaan dan olah raga
- c. Untuk mencapai sasaran ketiga: “Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi“, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :



- 1) Menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi berbasis sumber daya lokal
- d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Mengintensifkan pertolongan persalinan serta perawatan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas
  - 2) Menintensifkan pelaksanaan imunisasi dan perawatan kesehatan anak balita
  - 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan
  - 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat masyarakat
  - 5) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan **Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Meningkatkan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan
  - 2) Menumbuhkembangkan kawasan industri, aneka industri
  - 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam produktif
  - 4) Menjamin ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan sarana dan prasarana produksi
  - 5) Meningkatkan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura perikanan, perkebunan dan peternakan serta penganeekaragaman pangan
  - 6) Meningkatkan kualitas dan daya saing serta promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
  - 7) Mendorong dan memfasilitasi investasi masuk ke daerah
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :



- 1) Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis yang mendorong pemakaian produk lokal serta tenaga kerja lokal
- c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu
  - 2) Menumbuhkembangkan badan usaha daerah, lumbung desa, UMKM dan koperasi
  - 3) Menumbuhkembangkan sektor perdagangan dan jasa
  - 4) Menumbuhkembangkan lapangan kerja melalui peningkatan iklim usaha dan akses permodalan
  - 5) Meningkatkan kemampuan, kesempatan dan kemandirian berusaha serta kerjasama dengan badan usaha dalam penyaluran dan perlindungan ketenagakerjaan
- d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Baru”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Memfasilitasi Akses Permodalan dan Perizinan serta Pembinaan Bagi Usaha-Usaha Baru

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan **Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasn serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat** ini dapat dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : ” Meningkatkan Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
  - 1) Memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengusulan anggaran pemerintah atasan
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
  - 1) Menuntaskan Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat Minimal Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4



- c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan”, strategi yang digunakan adalah :
- 1) Mengoptimalkan Penggunaan APBD Kabupaten dan Pengusulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dari Pemerintah Atasan
- d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dunia Usaha dan Partisipasi Masyarakat
  - 2) Mengoptimalkan pendayagunaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan infrastruktur di desa
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum yang terbangun
  - 4) Melakukan penataan terhadap lingkungan permukiman kumuh
  - 5) Meningkatkan cakupan dan kualitas regulasi penataan ruang daerah
  - 6) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan berwawasan lingkungan
  - 7) Meningkatkan pengendalian dan perlindungan sumber daya alam
  - 8) Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penerapan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - 9) Meningkatkan mitigasi bencana, cakupan tanggap darurat dan penanganan pasca bencana

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan **Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :

- a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah



- 2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
  - 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
  - 4) Reformasi birokrasi yang berkelanjutan
  - 5) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan
  - 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah secara baku
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : “Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa” arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
  - 2) Memfasilitasi dan mendorong pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penegakan hukum di daerah
  - 2) Memperketat pengawasan internal terhadap penganggaran, pelaksanaan serta administrasi program kegiatan
  - 3) Mendorong dan memfasilitasi tenaga pemeriksa dan aparatur mengawasi untuk mengikuti diklat tentang pemeriksaan dan pengawasan
- d. Untuk mencapai sasaran keempat : “Meningkatnya kehidupan berdemokrasi”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman umum serta kehidupan berdemokrasi
  - 2) Menumbuhkembangkan budaya politik dan demokrasi yang baik dalam masyarakat
  - 3) Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan

Arah kebijakann yang ditetapkan untuk melaksanakan **Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan** dikelompokkan menurut sasaran yang ditetapkan yaitu :





- a. Untuk mencapai sasaran pertama : “Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat” arah kebijakan yang ditetapkan adalah :
- 1) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum dan air bersih
  - 2) Meningkatkan pembangunan serta mendorong masyarakat untuk memperoleh sanitasi dasar
  - 3) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau
  - 4) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh status tanah serta penyelesaian sengketa tanah
- b. Untuk mencapai sasaran kedua : ” Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya”, arah kebijakann yang ditetapkan adalah :
- 1) Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam upaya pengendalian dan penegakan hukum di daerah
  - 2) Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Untuk mencapai sasaran ketiga : “Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”, arah kebijakan yang ditetapkan adalah:
- 1) Mendorong lahirnya regulasi dan implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pemerintahan
  - 2) Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga non pemerintahan
  - 3) Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Penetapan strategi dan arah kebijakan di atas telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pada setiap misi. Keselarasan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran pembangunan selama periode RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dapat diuarikan pada tabel di bawah ini.



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Misi I :</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ).	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ).	Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan umat beragama	Meningkatkan kehidupan beragama dan kerukunan antar suku dan umat beragama	Meningkatkan perlindungan dan pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama
			Menumbuhkembangkan adat, budaya dan kearifan lokal dalam masyarakat	Re-Covery pemahaman dan implementasi nilai-nilai adat, budaya dan kearifan dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan
			Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat	Meminimalisir potensi-potensi yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik di masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun	Meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	Memfasilitasi dan mendorong semua lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk senantiasa memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal agar meningkat penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi dan daya saing
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
				Meningkatkan minat baca masyarakat
		Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan kreativitas dan prestasi generasi muda	Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kapasitas kegiatan kepemudaan dan olah raga
			Meningkatkan kemampuan, keahlian, kompetensi dan daya saing masyarakat	Menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi berbasis sumber daya lokal
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan terhadap ibu hamil dan nifas	Mengintensifkan pertolongan persalinan serta perawatan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas
			Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan tentang kesehatan anak balita	Menintensifkan pelaksanaan imunisasi dan perawatan kesehatan anak balita
			Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan
				Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat masyarakat
			Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Misi II :</b> Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang produktif dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang produktif dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat	Ekstensifikasi dan intensifikasi sektor-sektor perekonomian utama masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan
			Meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat dalam pengembangan aneka industri	Menumbuhkembangkan kawasan industri, aneka industri
			Meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan kebutuhan strategis lainnya	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam produktif
			Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pemasaran produk sektor-sektor perekonomian daerah	Menjamin ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan sarana dan prasarana produksi
			Meningkatkan investasi masuk ke daerah	Meningkatkan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura perikanan, perkebunan dan peternakan serta penganeekaragaman pangan
				Meningkatkan kualitas dan daya saing serta promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
		Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah	Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah	Mendorong dan memfasilitasi investasi masuk ke daerah
		Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah	Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis yang mendorong pemakaian produk lokal serta tenaga kerja lokal
			Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu
		Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Baru	Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Menumbuhkembangkan badan usaha daerah, lumbung desa, UMKM dan koperasi
				Menumbuhkembangkan sektor perdagangan dan jasa
				Menumbuhkembangkan lapangan kerja melalui peningkatan iklim usaha dan akses permodalan
				Meningkatkan kemampuan, kesempatan dan kemandirian berusaha serta kerjasama dengan badan usaha dalam penyaluran dan perlindungan ketenagakerjaan
			Mendorong dan Memfasilitasi Tumbuhnya Usaha-Usaha Baru di Masyarakat	Memfasilitasi Akses Permodalan dan Perizinan serta Pembinaan Bagi Usaha-Usaha Baru



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Misi III :</b> Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat	Meningkatnya Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Atasan	Memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengusulan anggaran pemerintah atasan
		Meningkatnya Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat	Meningkatkan dan Mendorong Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat	Menuntaskan Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat Minimal Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4
		Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	Mengupayakan Pembangunan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Dana APBD dan/atau dari Pemerintah Atasan	Mengoptimalkan Penggunaan APBD Kabupaten dan Pengusulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dari Pemerintah Atasan
		Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum lainnya	Melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dunia Usaha dan Partisipasi Masyarakat
				Mengoptimalkan pendayagunaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan infrastruktur di desa
				Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum yang terbangun
			Meminimalisir adanya lingkungan permukiman kumuh	Melakukan penataan terhadap lingkungan permukiman kumuh
			Meningkatkan ketaatan terhadap penataann ruang daerah.	Meningkatkan cakupan dan kualitas regulasi penataan ruang daerah
				Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan berwawasan lingkungan
			Optimalisasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian dan perlindungan sumber daya alam
				Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penerapan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah	Meningkatkan mitigasi bencana, cakupan tanggap darurat dan penanganan pasca bencana	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Misi IV :</b> Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih dan berwibawa	Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah
				Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
			Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan umum	Reformasi birokrasi yang berkelanjutan
				Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan
		Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah secara baku
			Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan desa	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
			Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah	Memfasilitasi dan mendorong pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
		Meningkatnya kehidupan berdemokrasi	Meminimalisir kesalahan kesalahan dalam penganggaran, pelaksanaan serta administrasi program kegiatan	Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penegakan hukum di daerah
			Meningkatkan kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Memperketat pengawasan internal terhadap penganggaran, pelaksanaan serta administrasi program kegiatan
			Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Mendorong dan memfasilitasi tenaga pemeriksa dan aparatur mengawasi untuk mengikuti diklat tentang pemeriksaan dan pengawasan
			Peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman umum serta kehidupan berdemokrasi
			Menumbuhkembangkan lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Menumbuhkembangkan budaya politik dan demokrasi yang baik dalam masyarakat
				Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Misi V :</b> Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.	Terwujudnya standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.	Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih bagi masyarakat	Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum dan air bersih
			Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat	Meningkatkan pembangunan serta mendorong masyarakat untuk memperoleh sanitasi dasar
			Meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau
			Meningkatkan kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat	Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh status tanah serta penyelesaian sengketa tanah
		Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya	Meningkatkan perlindungan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam upaya pengendalian dan penegakan hukum di daerah
			Menurunkan angka Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan Sosial
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan	Mendorong lahirnya regulasi dan implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pemerintahan
			Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat dan dunia usaha	Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga non pemerintahan
			Meningkatkan perlindungan anak.	Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.





## 1.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menetapkan strategi, arah kebijakan pada setiap misi sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam hal ini akan dijabarkan dan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Program pembangunan daerah yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 terdiri dari 3 jenis program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program-program tersebut adalah :

1. Program OPD adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi OPD.
2. Program lintas OPD adalah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.
3. Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan antar sektor/bidang, antar wilayah dan antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penetapan Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah berdasarkan urusan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun ketiga adalah sebagai berikut :

MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangunan yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ).	Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan umat beragama	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)	20.00	Meningkatkan kehidupan beragama dan kerukunan antar suku dan umat beragama	Meningkatkan perlindungan dan pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	3.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)	20.00
							Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	65.00
		Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat	60.00	Menumbuhkan bangkai adat, budaya dan kearifan lokal dalam masyarakat	Re-Covery pemahaman dan implementasi nilai-nilai adat, budaya dan kearifan dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat (%)	60.00
						Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Group Kesenian (Group)	17.00
							Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	2.00
							Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat (%)	60.00
		Persentase penanganan kasus sara (%)	100.00	Meningkatkan kerukunan hidup masyarakat	Meminimalisir potensi-potensi yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik di masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan kasus sara (%)	100.00
							Persentase Penyelesaian Konflik (%)	80.00
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun	Indeks Pembangunan Manusia	68.81	Meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	Memfasilitasi dan mendorong semua lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk senantiasa memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal agar meningkat penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi dan daya saing	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV (%)	80.54
							Jumlah guru yang bersertifikat (orang)	2,452.00
							Jumlah guru yang memenuhi Kompetensi (Orang)	1,411.00
					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (%)	45.50*
							Persentase Cakupan PAUD (%)	45.50*
						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melek Huruf (%)	99.94

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9.20
							Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14.51
							APK SD/MI (%)	107.36
							APK SMP/MTs (%)	89.11
							Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SD/MI (%)	29.99
							Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMP/MTs (%)	20.25
							APM SD/MI (%)	97.68
							APM SMP/MTs (%)	86.43
							Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI	1 : 135
							Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	1 : 210
							Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI	1 : 15
							Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs	1 : 10
							Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Baik (%)	87.83
							Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik (%)	79.75
							Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.34
							Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0.52
							Persentase Angka Kelulusan SD/MI (%)	99.92
							Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100.00
							Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	96.15
						Program Pendidikan Non Formal	Rombel Melanjutkan putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs (%) melalui Paket B	4.00
							Angka Melek Huruf (%)	99.94
					Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)	62,529
							Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)	4.17

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
						Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)	134.00
							Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun (Orang)	62,529
							Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)	4.17
		Jumlah Nilai Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan (Rp. Milyar)	4.50	Meningkatkan kreativitas dan prestasi generasi muda	Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kapasitas kegiatan kepemudaan dan olah raga	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)	1.50
							Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0.07
							Persentase Desa berstatus Swasembada (%)	28.89
						Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)	1.50
							Persentase Desa berstatus Swasembada (%)	28.89
						Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi)	41.00
							Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)	14.00
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)	14.00
						Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)	15.00
							Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi)	41.00
						Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Klub Olah Raga (Klub)	24.00
							Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)	15.00
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga (Unit)	5.00
							Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	75.00
	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna (%)	13.00	Meningkatkan kemampuan, keahlian, kompetensi dan daya saing masyarakat	Menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi berbasis sumber daya lokal	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha)	52,74*

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Produktivitas Padi Gogo (Kw/Ha)	32.72*
							Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	45.97*
							Produktivitas Kedelai (Kw/Ha)	15.20*
							Produktivitas Ubi Kayu (Kw/Ha)	361.20
							Produktivitas Tanaman Karet (Kg/Ha)	801.53
							Produktivitas Tanaman Sawit (Kg/Ha)	19,868
							Produktivitas Tanaman Kakao (Kg/Ha)	886.50
							Produktivitas Tanaman Aren (Kg/Ha)	1,411.63
							Produktivitas Tanaman Kelapa (kg/Ha)	532.94
							Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian dan Perkebunan (%)	13.00
						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)	45.00
							Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna (%)	13.00
						Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	5.37
							Pertumbuhan Industri (%)	2.43
							Jumlah Industri Kecil (Buah)	62.00
							Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)	1,083.00
						Program Penguatan Manajemen Kelitbangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders (%)	56.25
							Kajian Penelitian Indeks Pembangunan Daerah (Dokumen)	1.00
						Program Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Produktivitas Tanaman Karet (Kg/Ha)	801.53
							Produktivitas Tanaman Sawit (Kg/Ha)	19,868
							Produktivitas Tanaman Kakao	886.50

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							(Kg/Ha)	
							Produktivitas Tanaman Aren (Kg/Ha)	1,411.63
							Produktivitas Tanaman Kelapa (kg/Ha)	532.94
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 (KH)	0.67	Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan terhadap ibu hamil dan nifas	Mengintensifkan pertolongan persalinan serta perawatan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 (KH)	0.67
							Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	86.25
							Angka Kelangsungan Hidup Bayi ( Per 1.000 Kelahiran )	993.46
							Cakupan KEK ibu hamil (%)	20.00
							Pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan (jiwa)	4,550.00
							Persentase ibu hamil mendapat 90 tablet besi (%)	42.67
							Persentase ibu hamil yang anemia (%)	0.00
		Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 1.000 Kelahiran)	993.46	Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan tentang kesehatan anak balita	Menintensifkan pelaksanaan imunisasi dan perawatan kesehatan anak balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 1.000 Kelahiran)	993.46
							Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)	1.34
							Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.12
							Persentase Balita Gizi Kurang (%)	2.03
							Rasio Posyandu Per Satuan Balita (Per 1.000 Balita)	1 : 65
							Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan (%)	100.00
							Cakupan Kunjungan Bayi Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan (%)	79.73
							Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) (%)	93.00
							Persentase Bayi mendapat Kapsul Vitamin A (%)	72.55



# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)	50.00
		Angka Usia Harapan Hidup	64.57	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya (%)	100.00
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	88.43
							Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (%)	87.72
							Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100.00
						Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, Pustu dan Pusling Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	0.32
							Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Kecamatan (%)	106.67
							Cakupan Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Desa (%)	22.18
						Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per Satuan penduduk (Per 1000 Penduduk)	0.007
						Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	64.57
					Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	64.57
							Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%)	53.93
							Cakupan Informasi sadar hidup sehat (%)	100.00
						Program Pengawasan Obat dan Makanan	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	64.57
						Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	64.57

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							(Tahun)	
							Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.12
							Cakupan KEK ibu hamil (%)	20.00
						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Informasi sadar hidup sehat (%)	100.00
						Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Informasi sadar hidup sehat (%)	100.00
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)	0.24
							Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	1.79
							Persentase kecamatan bebas rawan gizi (%)	100.00
				Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)	2.06
							Rasio Akseptor KB (%)	68.85
							Persentase Pemakaian Kontasepsi (CPR) (%)	61.10
							Cakupan Penyuluhan KB (%)	80.00
						Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pemakaian Kontasepsi (CPR) (%)	61.10
							Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (%)	10.14
						Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Konseling Remaja yang bermasalah (%)	100.00
							Cakupan Pembina PIK Remaja yang terlatih (orang)	25.00
						Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rasio Akseptor KB (%)	68.85
							Cakupan Sarana dan prasarana pendukung Penyuluhan KB (%)	100.00
						Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Penyuluhan KB (%)	80.00
							Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 (KH)	0.67

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 1.000 Kelahiran)	993.46
							Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)	1.34
						Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Pos Yandu Aktif (%)	100.00
						Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Pembina PIK Remaja yang terlatih (orang)	25.00
						Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Konseling Remaja yang bermasalah (%)	100.00
<b>Misi II :</b> Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang produktif dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat	Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)	13.11	Ekstensifikasi dan intensifikasi sektor-sektor perekonomian utama masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rasio Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	21.82
							Rasio Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (%)	13.93
							Nilai Tukar Petani	102.41
							Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pertanian TPH selama satu tahun (%)	0.27
					Menumbuhkembangkan kawasan industri, aneka industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok Pengrajin (Kelompok)	45.00
							Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	26.39
							Jumlah Industri Kecil (Buah)	62.00
							Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)	1,083.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
						Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	5.37
							Pertumbuhan Industri (%)	2.43
				Meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat dalam pengembangan aneka industri	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam produktif	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	87.35
						Program Pemanfaatan dan Pengembangan Panas Bumi Penggunaan Langsung	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	87.35
					Menjamin ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan sarana dan prasarana produksi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM/K (Buah)	2,155.00
							Jumlah BPR dan LKM	9.00
		Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Bulan (Rp.)	640,964	Meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan kebutuhan strategis lainnya	Meningkatkan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura perikanan, perkebunan dan peternakan serta pengane karagaman pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)	1.00
							Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hr)	2,000.00
							Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	52.00
							Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)	1.50
							Skor Pola Pangan Harapan (%)	90.54
							Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)	1.00
							Stabilnya Harga Gabah di Tingkat Petani (%)	75.00
							Stabilnya Harga Beras di Tingkat Konsumen (%)	75.00
							Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (%)	82.00
							Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)	65.00
						Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Budidaya Perikanan Darat (Ton)	7,042.10
							Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)	42.50
							Persentase Capaian Konsumsi	105.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Ikan (%)	
						Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Laut (Ton)	177.13
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	73.09
							Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)	42.50
							Persentase Capaian Konsumsi Ikan (%)	105,00
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Padi Sawah (Ton)	187,519.00
							Produksi Padi Gogo (Ton)	10,076.00
							Produksi Jagung (Ton)	4,692.00
							Produksi Kedelai (Ton)	564.00
							Produksi Ubi Kayu (Ton)	8,298.00
							Produksi Jeruk (Ton)	5.60
							Produksi Salak (Ton)	236.00
							Produksi Manggis (Ton)	1.62
							Produksi Cabe (Ton)	930.00
						Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Kelompok Tani (Kelompok)	1,383.00
							Jumlah Kelompok Tani Pemula (Kelompok)	1,239.00
							Jumlah Kelompok Tani Lanjut (Kelompok)	134.00
							Jumlah Kelompok Tani Madya (Kelompok)	7.00
							Jumlah Kelompok Tani Utama (Kelompok)	3.00
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka Prevalensi Penyakit Hewan (%)	2.03
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi (Ton)	160.45
							Produksi Daging Kambing (Ton)	11.82
							Produksi Daging Ayam Kampung (Ton)	69.48
							Jumlah Ternak Sapi (Ekor)	3.000
							Jumlah Ternak Kerbau (Ekor)	625
							Jumlah Ternak Kambing (Ekor)	11,150

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Jumlah Ternak Ayam Ras Pedaging (ekor)	160,800
							Jumlah Ternak Ayam Buras (ekor)	184.000
							Jumlah Ternak Itik (Ekor)	38,500
				Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pemasaran produk sektor-sektor perekonomian daerah	Meningkatkan kualitas dan daya saing serta promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisata (Jumlah)	40,404
						Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	Persentase BUMD Yang Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) (%)	50.00
							Kontribusi BUMD Terhadap PAD (%)	0.47
						Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam pengembangan kepariwisataan (Jumlah)	2.00
						Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan (Jumlah)	2.00
						Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi perikanan (%)	72.00
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi perkebunan/pertanian (%)	1.00
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Sarana Pemasaran Peternakan (Unit)	72.00
							Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi peternakan (%)	72.00
		Nilai Investasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Rp. Milyar)	1,376,343	Meningkatkan investasi masuk ke daerah	Mendorong dan memfasilitasi investasi masuk ke daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah PMA/PMDN (buah)	13.00
							Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	1,376,343
							Jumlah Tenaga Kerja Pada PMA/PMDN (Orang)	7,659
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	1,376,343



# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha (Buah)	2.00
							Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah (Jenis)	22.00
	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah	Indeks Gini Rasio	< 3,00	Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah	Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis yang mendorong pemakaian produk lokal serta tenaga kerja lokal	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Indeks Gini Rasio	< 3,00
							Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29
	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	90.18	Mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	5.37
							Pertumbuhan Industri (%)	2.43
							Jumlah Kelompok Pengrajin (Kelompok)	45.00
							Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	26.39
							Jumlah Industri Kecil (Buah)	62.00
							Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)	1,083.00
						Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi Swakarsa (%)	37.12
					Menumbuhkembangkan badan usaha daerah, lumbung desa, UMKM dan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi (buah)	306.00*
							Persentase koperasi aktif (%)	56.54*
					Menumbuhkembangkan sektor perdagangan dan jasa	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB (%)	9.93
							Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Rp.juta)	798,128.95
						Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar tertib ukur (Unit)	3.00
							Jumlah Alat UTTP yang ditera/teralulang (Unit)	1,500.00
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB (%)	9.93

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
						Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Kelompok Bina Usaha Pedagang Informal (%)	88.93
		Persentase Pengangguran Terbuka (%)	5.09	Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja	Menumbuhkembangkan lapangan kerja melalui peningkatan iklim usaha dan akses permodalan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	94.79
							Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	130,429.00
							Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	32.75
							Persentase Pengangguran Terbuka (%)	5.09
					Meningkatkan kemampuan, kesempatan dan kemandirian berusaha serta kerjasama dengan badan usaha dalam penyaluran dan perlindungan ketenagakerjaan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Sengketa Pengusaha - Pekerja (%)	4.17
							Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	32.75
							Rasio Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	100.00
						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77.88
							Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	32.75
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Baru	Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan (Buah)	210.00	Mendorong dan Memfasilitasi Tumbuhnya Usaha-Usaha Baru di Masyarakat	Memfasilitasi Akses Permodalan dan Perizinan serta Pembinaan Bagi Usaha-Usaha Baru	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rata-Rata Lama Proses Perizinan (Hari)	8.10
							Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan (Buah)	210.00
							Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh KPTSP selama satu tahun (%)	0.20
						Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM/K (Buah)	2,155.00
							Jumlah BPR/LKM (Buah)	9.00
Misi III : Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah dengan memanfaatkan sumber daya di	Meningkatnya Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah	Nilai APBN dan APBD Provinsi yang Dialokasikan di Daerah (Rp. Juta)	160,000	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Atas	Memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengusulan anggaran pemerintah atas	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya dokumen dan implementasi penanggulangan masalah-masalah daerah (%)	100.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.								
						Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan dokumen dan implementasi kerjasama antar daerah (%)	60.00
						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur daerah pada wilayah strategis dan cepat tumbuh sesuai kebutuhan (%)	100.00
						Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan (%)	100.00
	Meningkatnya Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) (%)	95.57	Meningkatkan dan Mendorong Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat	Menuntaskan Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat Minimal Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	48.27
							Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	65.46
							Rasio Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4	0.004
							Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) (%)	95.57
							Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pekerjaan Umum selama satu tahun (%)	0.31
						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	48.27
							Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	65.46

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	95.57
							Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pekerjaan Umum selama satu tahun (%)	0.31
	Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	Persentase Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibangun di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan (%)	76.67	Mengupayakan Pembangunan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Dana APBD dan/atau dari Pemerintah Atasan	Mengoptimalkan Penggunaan APBD Kabupaten dan Pengusulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dari Pemerintah Atasan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibangun di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan (%)	76.67
							Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100.00
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	0.07	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum lainnya	Melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dunia Usaha dan Partisipasi Masyarakat	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Database jalan dan jembatan untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi yang up to date (dokumen)	1.00
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	65.46
						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	69.91
						Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Angkutan Darat Terhadap Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)	0.08
						Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Trafic Light (unit)	4.00
							Rambu Petunjuk (buah)	12.00
							Cermin Tikungan (buah)	2.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
						Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Marka Jalan (Km)	15.00
							Pagar Pengaman Jalan (km)	39.00
							Deliniator (Unit)	43.00
						Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Unit)	1.00
							Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)	2,628,910
							Jumlah Halte (Unit)	19.00
					Mengoptimalkan pendayagunaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan infrastruktur di desa	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)	212.00
					Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum yang terbangun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio Daya Tampung TPS Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.59
							Persentase Sampah Tertangani (%)	23.60*
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Angkutan Darat Terhadap Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)	0.08
							Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)	2,628,910
						Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rasio Ijin Trayek (%)	0.05
							Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Buah)	0.09
							Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	35.00
							Persentase Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (%)	80.99
							Rasio Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	26.78
				Meminimalisir adanya lingkungan permukiman kumuh	Melakukan penataan terhadap lingkungan permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0.07

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
					kumuh			
							Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata (%)	36.27
							Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	85.75
				Meningkatkan ketaatan terhadap penataann ruang daerah.	Meningkatkan cakupan dan kualitas regulasi penataan ruang daerah	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya RTRW (Dokumen)	1.00
							Tersedianya RDTRW (Dokumen)	1.00
							Luas Wilayah Kebanjiran berdasarkan RTRW (%)	6.78
							Luas Wilayah Produktif berdasarkan RTRW (%)	65.32
					Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	82.50
				Optimalisasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian dan perlindungan sumber daya alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya perlindungan dan konversi hutan kota (Ha)	31.00
						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pencemaran Status Mutu Air (%)	92.85*
							Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100.00
						Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	17.22*
							Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha)	300.00
							Pemantauan kerusakan lahan (%)	100.00
						Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha)	300.00
							Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%)	2.56*
						Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Pertambangan Tanpa Ijin Yang Ditetapkan (%)	32.49



# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Regulasi Untuk Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan (Dokumen)	1.00
					Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penerapan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase pemantauan kualitas udara (%)	70.00
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan Lingkungan (unit)	10.00
							Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah /SLHD (Dokumen)	1.00
							Tersedianya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (%)	35.00
				Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah	Meningkatkan mitigasi bencana, cakupan tanggap darurat dan penanganan pasca bencana	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	0.003
						Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan (%)	87.50
							Cakupan Masyarakat Terdampak Bencana Yang Mendapat Pelayanan Tanggap Darurat (%)	100.00
							Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	53.85
<b>Misi IV :</b> Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Area Perubahan Reformasi Birokrasi (%)	62.50	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Data Perekonomian Serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	2.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-2021 Serta Target Kinerja 2016-2021 (Dokumen)	1.00
							Kategori Nilai Lakip Kabupaten (Nilai)	B
							Nilai LPPD Kabupaten (Nilai)	2.40
							Persentase Area Perubahan Reformasi Birokrasi (%)	62.50
							Persentase E-Government Yang Terbangun (%)	62.50
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Usulan Eksekutif yang diagendakan untuk dibahas bersama Legislatif (Buah)	18.00
						Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (%)	5.99
							Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)	21.20
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	300.00
							Persentase Jabatan Struktural Yang Dilaksanakan Dibanding Dengan Jabatan Menurut PP 18 Tahun 2016 (%)	95.00
							Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)	21.20
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rasio PNS terhadap penduduk (%)	1.95
							Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	300.00
						Program Peningkatan SDM	Rasio PNS terhadap penduduk (%)	1.95
							Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	300.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
						Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)	75.00
							Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)	0.88
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100.00
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100.00
					Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)	75.00
						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Jaringan Komunikasi (jaringan)	5.00
							Jumlah Surat Kabar Nasional (jenis)	5.00
							Jumlah Penyiaran Radio/TV	15.00
							Website Milik Pemda (Unit)	2.00
							Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	67.41
						Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)	75.00
						Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)	75.00
						Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)	75.00
						Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data-data statistik daerah (%)	100.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
						Program Pengembangan Data/Informasi	Penyajian Data-Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah (KDA, KCDA, PDRB, Inkesra) (Dokumen)	4.00
							Penyajian Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (%)	55.00
							Tersedianya E Planning Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100.00
							Tersedianya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	1.00
		Persentase E-Government Yang Terbangun (%)	62.50	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)	1.00
							Persentase E-Government Yang Terbangun (%)	62.50
							Keputusan DPRD (Buah)	18.00
							Keputusan Pimpinan (Buah)	21.00
							Persentase Perda Yang Dilakukan Konsultasi Publik (%)	40.00
							Regulasi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada (Dokumen)	1.00
						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Anggota DPRD (Orang)	30.00
							Keputusan DPRD (Buah)	18.00
							Keputusan Pimpinan (Buah)	16.00
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan untuk dibahas dan ditindak lanjuti DPRD (Buah)	20.00
							Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindak lanjuti kepada DPRD (Buah)	105.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Jumlah Produk Peraturan Daerah yang menggunakan hak inisiatif (Buah)	10.00
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)	94.68
							Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)	44.25*
							Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)	6.10
							Rasio SILPA Terhadap Total Pendapatan (%)	0.25
							Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)	94.03
							Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)	95.60
							Peningkatan PAD (%)	5.39
							Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)	96.67
							Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
							Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)	1.00
							Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)	100.00
						Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan (%)	100.00
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sesuai kebutuhan (%)	100.00
						Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam sesuai	100.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							kebutuhan (%)	
						Program Perencanaan Sosial Budaya	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya sesuai kebutuhan (%)	100.00
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJD Yang Ditetapkan Dengan PERDA (Dokumen)	1.00
							Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA (Dokumen)	1.00
							Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Ditetapkan Dengan Perkada	1.00
							Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	92.43
							Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS (Dokumen)	1.00
							Regulasi Tata Cara Penyusunan (Dokumen) Rencana Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada (Dokumen)	1.00
							Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Hasil Analisis (Dokumen)	1.00
							Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Pokja)	1.00
							Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Dokumen)	1.00
							Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-2021 Serta Target Kinerja 2016-2021 (Dokumen)	1.00
					Reformasi birokrasi yang berkelanjutan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD (%)	0.00



# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
						Program Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana	Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD (%)	0.00
						Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Keprotokolan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100.00
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100.00
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan umum	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk (%)	91.13
							Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran (%)	76.04
							Rasio Pasangan Ber Akte Nikah (%)	35.96
							Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	91.00
					Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah secara baku	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	100.00
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	100.00
						Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	100.00
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Kantor Kepala Desa/Kelurahan Yang Terbangun (%)	46.59	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang berkompeten (%)	46.59
							Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)	212.00
				Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan desa	Memfasilitasi dan mendorong pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)	100.00
							Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)	212.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)	45.00
						Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)	100.00
							Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)	45.00
							Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)	100.00
							Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)	100.00
							Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)	212.00
	Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa	Jumlah Kebijakan Tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan (Buah)	7.00	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah	Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penegakan hukum di daerah	Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik	Jumlah LHP Kasus/Khusus dan Pengendalian Masyarakat (Kasus)	18.00
		Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti (%)	75.00	Meminimalisir kesalahan kesalahan dalam penganggaran, pelaksanaan serta administrasi program kegiatan	Memperketat pengawasan internal terhadap penganggaran, pelaksanaan serta administrasi program kegiatan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya pengawasan internal secara berkala (SKPD)	45.00
							Terselenggaranya pemeriksaan khusus dan sertijab, pengaduan masyarakat serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (OP)	50.00
							Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan (Rekomendasi)	155.00
							Terselenggaranya penanganan tindak lanjut hasil pengawasan (Rekomendasi)	123.00
							Rasio Temuan BPK RI Yang Ditindaklanjuti (%)	75.00
							Tersedianya laporan pajak pribadi PNS (orang)	5,004.00
							Terselenggaranya sosialisasi pengendalian intern pemerintahan	46.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							(SKPD)	
		Persentase Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (%)	19.00	Meningkatkan kompetensi tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Mendorong dan memfasilitasi tenaga pemeriksa dan aparaturnya mengawasi untuk mengikuti diklat tentang pemeriksaan dan pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (%)	71.00
	Meningkatnya kehidupan berdemokrasi	Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)	11.00	Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman umum serta kehidupan berdemokrasi	Program Pembinaan, Pengawasan Serta Fasilitas Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah	Cakupan Persandian Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan (%)	65.00
				Peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat	Menumbuhkembangkan budaya politik dan demokrasi yang baik dalam masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (%)	73.00
						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100.00
							Jumlah LSM Yang Aktif (LSM)	32.00
							Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)	11.00
							Cakupan pembinaan terhadap politik daerah (%)	100.00
				Menumbuhkembangkan lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelesaian Konflik (%)	80.00
							Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29
							Cakupan Pelayanan Administrasi Sosial Kemasyarakatan (%)	65.00
<b>Misi V : Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.</b>	Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	67.26	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih bagi masyarakat	Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum dan air bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	67.26
							Rumah Tangga Bersantitas (%)	39.14

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
		Rumah Tangga Bersanitasi (%)	39.14	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat	Meningkatkan pembangunan serta mendorong masyarakat untuk memperoleh sanitasi dasar	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	67.26
							Rumah Tangga Bersanitasi (%)	39.14
		Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah (%)	79.17	Meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah (%)	79.17
						Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.94
				Meningkatkan kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat	Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh status tanah serta penyelesaian sengketa tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah	Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2)	806,906
						Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	100.00
	Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya	Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)	9.35	Meningkatkan perlindungan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam upaya pengendalian dan penegakan hukum di daerah	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	4.22
							Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)	9.35
							Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	106.53
							Penegakan Perda (%)	77.20
							Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	48.22
						Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Pos Kamling (Unit)	188.00
							Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan (%)	75.81
							Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)	9.35
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29	Menurunkan angka Penyandang Masalah-Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah-Kesejahteraan	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)	9.35

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
					Sosial.			
							Penegakan Perda (%)	77.20
						Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29
							Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100.00
							Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0.31
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)	4.00
							Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)	4.00
							Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29
						Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29
							Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00
							Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100.00
							Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0.31

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
						Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29
						Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)	4.00
							Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)	4.00
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah (%)	54.41	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan	Mendorong lahirnya regulasi dan implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pemerintahan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah (%)	54.41
							Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)	29.06
						Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0.05
		Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)	29.06	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat dan dunia usaha	Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga non pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)	29.06
							Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.02
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0.31	Meningkatkan perlindungan anak.	Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.02
							Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00
							Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan kekerasan (%)	100.00
						Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.02
							Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00
							Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan	100.00

# Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018
							kekerasan (%)	
						Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan kekerasan (%)	100.00
							Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.02
							Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00
							Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100.00
							Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0.31





## BAB 3

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PROYEKSI PENERIMAAN SERTA BELANJA DAERAH

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 3.1.1. Kondisi dan Asumsi Kerangka Ekonomi Makro Daerah.

Perekonomian suatu daerah selain akan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas ekonomi dan jasa masyarakat pada daerah itu sendiri, juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik, keamanan dan perkembangan perekonomian secara nasional. Dengan demikian dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah, prediksi tentang perkembangan ekonomi nasional sangat dibutuhkan.

Sebagaimana dimuat pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, bahwa asumsi ekonomi makro nasional yang sekaligus sebagai dasar penyusunan keuangan Negara dalam APBN 2018 yaitu pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan 5,4 – 6,1 persen, inflasi kisaran 2,5 – 4,5 persen, Nilai Tukar Rupiah 13.500 – 13.800 Rp/USD, Harga Minyak Mentah 45 - 60 USD/barel, Lifting Minyak Mentah 771 – 815 rb barel/hr, lifting Gas Bumi 1.194 – 1.235 rb barel/hr. Untuk mencapai target tersebut Pemerintah fokus kepada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan yaitu industri pengolahan terutama non-migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi serta jasa keuangan. Pada Tahun 2018 ke depan Pemerintah memfokuskan pembangunan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan perannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian dan pariwisata. Sementara itu konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diraih dengan mengendalikan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah.

Disaat penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Pusat telah mempertajam asumsi ekonomi makro nasional dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang terkoordinasi yaitu rata-rata Nilai Tukar Rupiah 13.500/USD, laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan



pada tingkat 3,50 persen dan rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan akan mencapai 5,30 persen. Sedangkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price - ICP) di pasar internasional akan berada pada kisaran 48,00 USD/barel, Lifting Minyak Mentah diperkirakan 800 ribu barel/hr, lifting Gas Bumi diperkirakan mencapai 1,20 juta barel setara minyak per hari.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan tiga tahun terakhir menunjukkan trend pertumbuhan positif, bahwa secara rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014 s/d 2016 adalah sebesar 4,80 persen. Pada akhir Tahun 2016, empat sektor Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 41,83 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,56 persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 10,75 serta Sektor Konstruksi sebesar 10,67 persen.

Tabel 2.1. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014 - 2016 (Persen) dan Kontribusi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Persen)

No.	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun (Pertumbuhan %)			kontribusi (%)
		2014	2015*	2016**	
1	2	3	4	5	6
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.82	3.15	4.29	41.83
B.	Pertambangan & Penggalian	0.79	6.30	3.71	15.56
C.	Industri Pengolahan	2.70	3.03	4.23	6.78
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7.35	8.66	4.42	0.04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.64	4.00	6.71	0.08
F.	Konstruksi	6.80	5.45	7.94	10.67
G.	Perdagangan, Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.96	8.94	8.82	10.75
H.	Transportasi dan Pergudangan	8.00	7.12	6.52	1.56
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.63	6.89	8.07	1.44
J.	Informasi dan Komunikasi	7.50	7.70	7.76	0.49
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.52	4.77	2.39	0.90
L.	Real Estate	7.46	8.29	8.38	2.11
M.	Jasa Perusahaan	6.83	6.15	5.95	0.06
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	7.59	6.35	2.11	6.27
O.	Jasa Pendidikan	7.40	6.37	6.96	0.66
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.00	7.56	7.37	0.76
Q.	Jasa lainnya	7.30	6.80	6.50	0.04
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.44	4.86	5.11	100.00

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017



Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, memperhatikan arah kebijakan ekonomi makro regional dan nasional serta tetap berpedoman kepada proyeksi perkembangan indikator ekonomi makro daerah di Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018, maka target ekonomi makro daerah Tahun 2018 yaitu pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan 5,30 persen dan inflasi diharapkan stabil pada kisaran 3,28 persen. Adapun indikator ekonomi makro lain yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2018 yang diproyeksikan antara lain adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 10,14 Triliun, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,09 persen dan PDRB per kapita ADHB sebesar 45,74 Juta. Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 ini dapat dicapai dengan mengendalikan tingkat inflasi daerah, kondisi keamanan masyarakat kondusif, Program APBN dan APBD Provinsi terealisasi seratus persen, investasi swasta dan masyarakat berjalan sebagaimana direncanakan dan meningkatnya pendapatan bagi Hasil Pajak dari Provinsi, disamping itu pembangunan konstruksi PLTA Batangtoru dapat berjalan dan Perusahaan pertambangan emas PT. Agincourt Resources tidak melakukan perubahan manajemen dan pemegang saham serta memproduksi secara normal dan harga logam mulia (emas) di pasar dunia stabil. Selain itu faktor eksternal yakni pertumbuhan ekonomi regional dan nasional dapat tercapai sesuai harapan.

Untuk lebih jelasnya tentang kondisi, target dan proyeksi indikator ekonomi makro daerah sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Tapnuli Selatan Tahun 2017 - 2018 (Persen)

No.	INDIKATOR EKONOMI MAKRO	SATUAN	TAHUN		
			2016 (Capaian)*	2017 Perkiraan	2018 (Target)
1.	PDRB (ADHK)	Rp. Milyar	8.314,48	8.968,45	10.144,21
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB ADHK	%	5,11	4,22	5,30
3.	Laju Inflasi	%	1,66	2,18	3,28
4.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral :				
4.1	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	%	41,83	43,82	40,36
4.2	Pertambangan & penggalian	%	15,56	18,53	23,66
4.3	Industri pengolahan	%	6,78	6,01	5,37
4.4	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,04	0,05	0,05
4.5	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	%	0,08	0,07	0,07
4.6	Konstruksi	%	10,67	9,31	8,50



No.	INDIKATOR EKONOMI MAKRO	SATUAN	TAHUN		
			2016 (Capaian)*	2017 Perkiraan	2018 (Target)
4.7	Perdagangan, Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	10,75	10,04	9,93
4.8	Transportasi dan Pergudangan	%	1,56	1,47	1,34
4.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,44	1,35	1,22
4.10	Informasi dan Komunikasi	%	0,49	0,64	0,59
4.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	0,90	0,86	0,76
4.12	Real Estate	%	2,11	1,72	1,53
4.13	Jasa Perusahaan	%	0,06	0,05	0,05
4.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	%	6,27	4,58	5,21
4.15	Jasa Pendidikan	%	0,66	0,72	0,65
4.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0,76	0,76	0,70
4.17	Jasa lainnya	%	0,04	0,03	0,03
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,91	5,37	5,09
6.	- PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	30,03	32,10	36,02
	- PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	39,60	40,77	45,74

## 3.2. Perkiraan Penerimaan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen keuangan daerah tersebut.

Kebijakan keuangan daerah juga tergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah daerah.

### 1.2.1 Sumber Penerimaan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dimana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan terhadap 3 komponen utama yaitu :



- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- b. Dana Perimbangan meliputi : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi : Dana Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

### 1.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan daerah yang akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah,
  - Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi





daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 persen (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada OPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.



- Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
  - a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
  - b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
  - a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non-permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
  - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
  - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri





Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

### 2. Dana Perimbangan

Penganggaran untuk pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
  - Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.
  - Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2018.
  - Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.
- Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :



Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- **Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) :**

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5 persen dari alokasi DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah



Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Penganggaran pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang di terima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.
- Bila daerah memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus



produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

### **1.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan kewenangan serta harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

#### **1. Belanja Tidak Langsung**

- Belanja Pegawai
  - Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan



gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018 pada kelompok Belanja Tidak





Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

- **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- **Belanja Bagi Hasil Pajak**

- Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.



### - Belanja Bantuan Keuangan

- Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing pihak.
- Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran & Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah Kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu,





pemerintah kabupaten harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

### - Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### - Belanja Pegawai

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.



### - Belanja Barang dan Jasa

- Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check-up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101



Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing OPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; pimpinan dan Anggota DPRD; serta unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di dalam daerah. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan diklat, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### - Belanja Modal

- Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.



- Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

### **1.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### **1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penganggaran penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan berdasarkan perkiraan yang rasional terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

#### **2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya khususnya pada PT. Bank Sumut, disamping itu pengeluaran pembiayaan daerah juga





diperuntukkan untuk pembayaran pokok hutang kepada pihak ketiga yang belum dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2017.

### 3.3. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan data terakhir Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2018 sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.243.242.590.237,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>110.678.075.237,00</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	19.536.571.066,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.870.044.188,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.272.168.983,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.999.291.000,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>920.379.409.000,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	109.233.860.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	644.304.467.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	166.841.082.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>212.185.106.000,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.978.250.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.350.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-
1.3.6	Dana Desa	145.856.856.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.246.950.322.244,00</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>729.343.504.244,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	484.939.012.817,00
2.1.2	Belanja Bunga	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-
2.1.4	Belanja Hibah	8.846.100.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.428.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3.499.249.825,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	227.031.141.602,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>517.606.818.000,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.707.732.007,00)</b>

## Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun Anggaran 2018



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.707.732.007,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>27.707.732.007,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	27.707.732.007,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>24.000.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.5	Pembayaran Utang Retansi	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>3.707.732.007,00</b>
<b>3.3</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN</b>	<b>0,00</b>





## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun untuk dapat dijadikan acuan ataupun pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

Sipirok,

2017

**WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN**

Selaku,  
PIHAK I

**Ir. H. ASWIN EFFENDI SIREGAR, MM**

**PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Selaku,  
PIHAK II

**H. RAHMAT NASUTION, S.Sos**